
**KAJIAN PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP TIMBULNYA
KEMACETAN DI JALAN TRANS MAUMERE LARANTUKA DESA GELITING**

Fitrah¹, Danar Aswim², Natsir Rodja³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Maumere

Email: fitrahfitrah749@gmail.com¹, danaraswim@gmail.com², natsirodja15@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) yang turut berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas di Jalan Trans Maumere–Larantuka, khususnya di wilayah Desa Geliting. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku PKL terhadap timbulnya kemacetan di Jalan Trans Maumere–Larantuka Desa Geliting. Serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas perdagangan di sepanjang ruas jalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan informan yang meliputi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Desa Geliting, serta para pedagang kaki lima. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data terdiri atas proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di pasar Desa Geliting ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan antara lain yaitu, tidak mentaati peraturan lalu lintas, tidak mentaati peraturan dari Pemerintah daerah, dan tidak mentaati SK dari Pemerintah Kabupaten Sikka. Adapun hambatan dari Pemerintah daerah dalam menangani PKL adalah, PKL susah di atur, kurangnya kerja sama antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam menertibkan PKL. Kemudian kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam menangani perilaku PKL yang menyebabkan kemacetan belum diimplementasikan secara optimal.

Kata Kunci: Kajian, Perilaku, Pedagang Kaki Lima, Kemacetan, Lalu Lintas.

Abstract: This study aims to identify and analyze the behavior of street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) that contribute to traffic congestion on the Trans Maumere–Larantuka Road, particularly in the Geliting Village area. In addition, the study seeks to describe the behavior of street vendors in relation to the emergence of traffic jams in Geliting Village and to identify the obstacles faced by the local government in regulating trading activities along the road. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data sources consist of both primary and secondary data, with informants including members of the Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Head of Geliting Village, and the street vendors themselves. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification of findings. The results of the study indicate that in the Geliting Village market, several factors contribute to traffic congestion, including non-compliance with traffic regulations, non-compliance with local government regulations, and disobedience to decrees

issued by the Sikka Regency Government. The local government faces several challenges in managing the street vendors, including difficulties in regulating vendor behavior and a lack of cooperation between sub-district and district governments in managing the vendors. Furthermore, the policy of the Sikka Regency Government, East Nusa Tenggara Province, regarding the behavior of street vendors causing congestion has not yet been optimally implemented.

Keywords: *Study, Vendor Behavior, Traffic, Congestion, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat modern karena menjadi ruang interaksi antara manusia dan kendaraan dalam aktivitas sehari-hari (Wu, 2023). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di jalan. Interaksi ini tidak hanya menciptakan dinamika pergerakan, tetapi juga potensi benturan kepentingan, seperti kemacetan ataupun kecelakaan (Purnama et al., 2023). Oleh sebab itu, ketertiban dan kesadaran dalam berlalu lintas menjadi aspek mendasar untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran bagi seluruh pengguna jalan (District, 2025). Ketertiban sendiri merupakan unsur yang wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia, karena menjadi dasar terciptanya suasana tertib, damai, dan teratur (Made et al., 2021). Dalam konteks lalu lintas, ketertiban tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga mengarahkan masyarakat untuk mematuhi aturan demi kebaikan bersama (Moat et al., 2023).

Pentingnya ketertiban lalu lintas semakin terlihat ketika pelanggaran terjadi, baik oleh pengendara roda dua maupun roda empat (Anggreni et al., 2023). Kecelakaan lalu lintas, misalnya, sering dipicu oleh tindakan seperti tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu sein, berkendara melawan arus, serta kurangnya kepedulian terhadap pengguna jalan lain (City et al., 2023). Hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan lalu lintas belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat, meskipun aturan tersebut dibuat untuk melindungi keselamatan bersama (Hukum et al., 2025). Ketika kepatuhan rendah, dampaknya bukan hanya kecelakaan, tetapi juga munculnya persoalan lalu lintas lain seperti kemacetan yang semakin parah dari waktu ke waktu (Afandi et al., 2025).

Kemacetan menjadi fenomena yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun wilayah pedesaan (Moat et al., 2023). Di kota-kota besar seperti Jakarta dan

Surabaya, kemacetan sering dihubungkan dengan volume kendaraan yang tinggi dan keterbatasan kapasitas jalan. Namun ternyata, pola serupa juga terjadi di desa-desa (Sonny & Antou, 2025). Tidak jarang kemacetan bukan hanya disebabkan oleh kondisi fisik jalan, tetapi juga karena perilaku masyarakat yang memarkir kendaraan sembarangan atau menggunakan badan jalan secara tidak semestinya (Minggu & Putra, n.d.). Ditambah lagi, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan setiap tahun turut memperburuk keadaan (Pembangunan et al., 2020).

Secara umum, terdapat dua kelompok faktor yang mempengaruhi kelancaran lalu lintas, yaitu faktor internal dan eksternal (Internal et al., 2025). Faktor internal mencakup meningkatnya produksi kendaraan, kualitas infrastruktur, dan kapasitas jalan (Management, 2021). Sementara itu, faktor eksternal meliputi kecelakaan, bencana alam, keberadaan pedagang kaki lima (PKL), on street parking, dan berbagai aktivitas lain yang menghambat arus kendaraan (Yahya et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada faktor eksternal, khususnya aktivitas PKL yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya kemacetan (Intelek et al., 2024).

Salah satu penyebab kemacetan yang sering ditemukan di lapangan adalah keberadaan pasar liar atau aktivitas jual beli yang berlangsung hingga ke badan jalan (Zainal & Kota, 2021). Perilaku ini menyebabkan penyempitan ruas jalan sehingga kendaraan dan pejalan kaki merasa terganggu (Yahya et al., 2022). Ruang yang seharusnya digunakan untuk bergerak justru dipenuhi oleh aktivitas perdagangan yang tidak sesuai aturan (Management, 2021). Hal ini semakin diperparah ketika pejalan kaki kehilangan ruangannya karena trotoar beralih fungsi menjadi tempat berjualan PKL. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 secara jelas menyebutkan bahwa trotoar diperuntukkan sebagai sarana bagi pejalan kaki agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Namun, dalam praktiknya, fungsi tersebut sering diabaikan oleh PKL yang memanfaatkan trotoar untuk berdagang.

Selain faktor PKL, kemacetan juga diperburuk oleh kendaraan yang diparkir di badan jalan, menurunnya tingkat pelayanan jalan, serta lemahnya penegakan disiplin berlalu lintas (Selatan et al., 2020). Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga terlihat di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Mbei et al., 2024). Salah satu contoh nyata adalah kemacetan yang hampir setiap hari terjadi di Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, khususnya di ruas Jalan Raya Trans Maumere–Larantuka (Moat et al., 2023). Sepanjang bahu

jalan dan trotoar dipenuhi oleh PKL, sementara pengendara mobil dan motor memarkirkan kendaraannya tanpa memperhatikan aturan (Hikmawan et al., 2025). Akibatnya, jalan yang seharusnya menjadi ruang pergerakan kendaraan menjadi sempit dan arus lalu lintas tersendat (Yany et al., n.d.).

Pemerintah Kabupaten Sikka sebenarnya telah menyediakan solusi dengan membangun pasar baru di Desa Wairkoja untuk menampung pedagang dari eks Pasar Geliting, akan tetapi para PKL banyak yang tetap memilih berjualan di lokasi lama karena alasan strategis atau kedekatan dengan pelanggan (Pertiwi, 2024). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan berbagai upaya penertiban, termasuk razia berkala, namun tingkat kepatuhan masih rendah (Rukmana et al., 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kemacetan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat dan efektivitas penegakan aturan (Kusuma, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, selama 16 hari (13–28 Februari 2025) karena lokasi tersebut hampir setiap hari mengalami kemacetan akibat aktivitas PKL dan perilaku pengendara. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara alami di lapangan. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Kepala Desa, enam PKL, dan petugas Satpol PP, serta sumber sekunder berupa dokumen dan literatur pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan, melakukan wawancara mendalam, serta mengumpulkan bukti dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan gambaran mengenai perilaku PKL dan faktor penyebab kemacetan di Desa Geliting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perilaku PKL terhadap timbulnya kemacetan di jalan Trans Maumere - Larantuka Desa Geliting.

Menurut hasil penelitian yang bertepatan di lokasi eks pasar Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka. Terkait dengan perilaku PKL, terhadap

timbulnya kemacetan di ralan raya, Trans Maumere Larantuka Desa Geliting. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya berbagai macam faktor antara lain perilaku PKL yaitu sebagai berikut:

a. Tidak mentaati peraturan lalu lintas

Adanya PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan menimbulkan kemacetan, bahkan terjadi kerawanan sosial lainnya, seperti pertengkaran, dan perkelahian antara sesama pedagang dan masyarakat pembeli. Penjelasan Bapak Fyator di atas, di perkuat oleh (Sari et al., 2023).

Mengatakan bahwa, keberadaan PKL yang tidak tertib kerap memicu konflik horizontal, baik antar sesama pedagang, maupun pedagang dengan masyarakat sekitar, karena ruang publik yang seharusnya milik bersama, berubah menjadi area rebutan. Hal tersebut, berkaitan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa Gerak kendaraan dan orang di luar lalu lintas jalan. Kemudian fungsi trotoar adalah pada dasarnya sebagai sarana bagi Masyarakat untuk tempat berjalan kaki dengan nyaman dan aman, sekarang sudah beralih fungsi menjadi lokasi bagi PKL yang menjual barang dagangannya (Kaki et al., 2025). Sehingga demikian apa yang dilakukan oleh para PKL tersebut, tidak mematuhi aturan yang berlaku, dan mereka tidak peduli terhadap kemacetan yang terjadi di jalan raya. Menurut (Zalvia & Adnan, 2025) menekankan bahwa aktivitas PKL tanpa izin di ruang publik, berdampak pada penurunan kualitas fungsi Jalan dan menciptakan konflik antar pengguna ruang kota.

b. Tidak mentaati peraturan dari pemerintah daerah Kabupaten Sikka

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 tahun 2018, tentang ketertiban dan ketentaraman umum, yang berbunyi bahwa: Setiap orang di larang menempatkan barang, berjualan dan/ atau berusaha di jalan, trotoar, emperan toko, Jalur hijau, Tanaman, dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang. Namun demikian, para PKL di Desa Geliting tetap barjualan, dan tidak mengindahkan peraturan tersebut. Selain itu jalan Trans Maumere-Larantuka di Desa Geliting, terkesan kumuh dan kebersihannya sangat prihatin karena Pedagang membuang limbah di Jalan, bahkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas akibat

jalannya licin (Febriany & Radam, 2023). Menurut (Airlambang et al., 2021) perilaku PKL yang menempati ruang publik secara ilegal, dapat memicu kerusakan tata ruang kota, dan menimbulkan konflik secara sosial serta gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Selain itu, (Airlambang et al., 2021) juga menjelaskan bahwa banyaknya pelanggaran oleh PKL disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta kurangnya kesadaran hukum dari para pedagang.

- c. Tidak mentaati SK dari pemerintah daerah Kabupaten Sikka.

Berkaitan dengan kemacetan lalin, maka pemerintah daerah Kabupaten Sikka, telah membuat SK untuk memindahkan pasar ke Desa Wairkoja, yang sekarang disebut dengan pasar Wairkoja, namun para pedagang tetap berjualan di eks pasar Geliting. Untuk hal tersebut baik pemerintah Desa maupun pemerintah daerah, melalui Polisi Pamong Praja tetap melakukan sosialisasi dan penertiban. Namun kurangnya kesadaran para PKL, dengan tetap berjualan di eks pasar Geliting. Penggunaan trotoar dan bahu jalan oleh PKL untuk berdagang di eks pasar Geliting, tidak hanya menimbulkan kemacetan lalu lintas saja, akan tetapi mengganggu keindahan Desa Geliting, dan membuat ketidak nyamanan masyarakat serta pejalan kaki, aktifitas pasar lebih memuncak pada setiap hari Jumat, banyak kendaraan yang parkir menaik dan menurunkan penumpang, hal itu menimbulkan kemacetan dan juga terjadi bongkar muat barang oleh pedagang toko.

Kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Geliting, dan Desa lain yang memanfaatkan hari pasar (Jumat) sehingga terjadi kerumunan pembeli di jalan raya. Hal di atas sesuai dengan Pendapat (Hakim et al., 2024) yang menyatakan bahwa Pengguna Trotoar dan bahu jalan oleh PKL, dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal senada Juga di sampaikan (Riset et al., 2024) bahwa pelanggaran ruang publik berdampak pada estetika dan ketertiban umum.

2. Hambatan dan solusi pemerintah daerah dalam mencegah PKL yang berjualan di sepanjang jalan Trans Maumere- Larantuka Desa geliting.
 - a. PKL yang susah di atur

Hambatan yang di alami oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Sikka, dalam mencegah para PKL yang berjualan di bahu jalan, adalah mereka tidak

mau di atur karena menganggap bahwa eks pasar Geliting lebih menguntungkan mereka dari jumlah pembeli yang banyak (T. Ilmu & Amuntai, 2024).

Pemerintah memberikan satu solusi yaitu, menyediakan tempat atau kawasan bagi para PKL, untuk bisa berjualan di pasar yang sudah di siapkan yaitu pasar Wairkoja. Kemudian, selain solusi yang di berikan oleh pemerintah. Maka pemerintah juga harus melakukan penataan dan penertiban PKL, gunanya adalah untuk menghilangkan efek negatif yang biasanya di timbulkan oleh keberadaan para PKL, dengan pola ketidak teraturannya, seperti menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas,serta mengurangi keindahan Desa Geliting. Penjelasan di atas sejalan dengan pandangan (S. Ilmu et al., 2012) yang menekankan pentingnya peran pemerintah, dalam melakukan penataan ruang agar Aktivitas PKL tidak mengganggu fungsi utama jalan dan trotoar.

- b. Kurangnya kerja sama antara pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten dalam menertibkan PKL di eks pasar Geliting.

Perlu diketahui bahwa, untuk menertibkan para PKL yang ada di eks pasar Desa Geliting, harus di sertai adanya dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak terkait, baik itu dari kecamatan maupun dari masyarakat Desa Geliting sendiri. Akan tetapi, realita yang terjadi sekarang adalah bahwa Camat Kewapante, kurang mendukung ketika satuan Polisi Pamong Praja turun razia di eks pasar Desa Geliting. Selain itu partisipasi dari masyarakat Geliting sendiri tidak ada sama sekali. Padahal, demi kenyamanan, dan ketentraman masyarakat sekitar Desa Geliting, bahkan masyarakat Desa Geliting mendukung adanya kegiatan pasar di Geliting dengan alasan ke pasar Wairkoja terlalu jauh. Hal di atas di perkuat oleh (Traditional et al., 2021) menurutnya keberhasilan penertiban PKL sangat bergantung pada sinergi, antar lembaga pemerintah dan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi sosial. Sementara itu, menyatakan bahwa faktor (Sanaky, 2021) kedekatan lokasi, dan kemudahana akses menjadi alasan utama masyarakat mendukung keberadaan pasariInformal meskipun melanggar aturan.

Adapun solusi dari pemerintah untuk PKL yang berjualan di eks pasar Desa Geliting antara lain adalah:

- 1) Pedagang kaki lima (PKL) diwajibkan untuk berjualan di pasar Wairkoja.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan solusi dengan melarang keberadaan PKL yang berjualan di eks pasar Desa Geliting.

- 2) Menyediakan tempat khusus untuk PKL berjualan.

Menyediakan tempat khusus bagi para PKL, merupakan solusi yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, tujuannya yaitu supaya PKL tidak berjualan lagi di trotoar dan bahu jalan, serta menghindari terjadinya kemacetan di eks pasar Desa Geliting. Penataan PKL tidak akan efektif tanpa penyediaan tempat usaha yang memadai sebagai bagian dari strategi relokasi yang berkeadilan. Hal ini di perkuat oleh (Akil et al., 2023) yang menyatakan bahwa pelanggran aktivitas PKL di area terlarang seperti, jalan dan trotoar harus di sertai dengan kebijakan penyediaan zona dagang alternatif agar tidak menimbulkan konflik sosial dan ekonomi.

Aturan yang tercantum di dalam Passal 19, mengenai larangan berjualan serta Passal 41 tentang penertiban, sebenarnya telah jelas mengatur ketertiban di pasar Geliting. Namun menurut pernyataan Bapak Jimmy, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari Harapan. Meskipun peraturan sudah di tetapkan namun implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara aturan dan realita yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan kemacetan di sepanjang Jalan Trans Maumere–Larantuka, Khususnya di wilayah eks Pasar Desa Geliting, bersumber dari perilaku pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku

Selain perilaku yang tidak tertib dari para PKL, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses penertiban. Salah satu solusi yang telah ditetapkan adalah relokasi PKL ke Pasar Wairkoja serta penyediaan tempat dagang khusus yang layak dan sesuai peruntukannya. Namun, keberhasilan implementasi solusi ini sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. R., Dikson, M., & Pitang, Y. (2025). *Silivester Robby Afandi 1* , Melkias Dikson 2 , Yuliani Pitang 3*. 6, 531–540.
- Airlambang, S., Puspitasari, P., Arsitektur, J., Trisakti, U., & City, D. (2021). *PEDESTRIAN PATHS UTILIZATION: SAFETY AND ATTRACTIVENESS ASPECTS*. 06(2), 69–74. <https://doi.org/10.25105/livas.v6i2.10029>
- Akil, A., Yudono, A., & Osman, W. W. (2023). *Suitable Potential Locations for Street Vendors in Makassar City , Indonesia*. 11(3), 152–171.
- Anggreni, K. D., Putra, Y., Kabupung, A. S., Studi, P., Sipil, T., Nusa, U., Jln, N., & No, K. (2023). *DITINJAU DARI SEGI PERLENGKAPAN JALAN DAN PERSEPSI PENGGUNA JALAN (JALAN AHMAD YANI MAUMERE KABUPATEN SIKKA)*. 9(2), 27–34.
- City, M., Yuniaty, F. R., Karels, D. W., & Ramang, R. (2023). *Analisis Hambatan Samping Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Kota Maumere Analysis of Side Friction to the Level of Road Service on Ahmad Yani Street ,.* 3(2), 1–9.
- District, M. (2025). *Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Windusari , Kabupaten Magelang*. 7.
- Febriany, N., & Radam, I. F. (2023). *THE EFFECT OF STREET VENDORS ON TRAFFIC CHARACTERISTICS ON-ROAD SECTION WITH TYPE 2 / 2 UD (CASE STUDY OF JL . JENDRAL SUDIRMAN IN BANJARMASIN)*. 7(4), 220–229.
- Hakim, D. R., Salim, L. A., Mardhani, M. A., Biostatistika, E., Kesehatan, P., & Kesehatan, F. (2024). *Gambaran Niat Masyarakat dalam Menerapkan Protokol Kesehatan pada Pasar Tradisional selama Masa Pandemi di Kota Surabaya An Overview of the Community 's Intentions in Implemen ting Health Protocols at Traditional Markets During the Pandemic in the City of Surabaya*.
- Hikmawan, A., Iman, N., Hariwibowo, F., & Lestira, M. (2025). *The Effect of on-Street Parking on Traffic Performance in Commercial Areas of Small Cities in Indonesia (Case Study : St . Merdeka Utara Cirebon)*. 6(2), 999–1019.
- Hukum, K. J., Publik, A., Komunikasi, I., Asanab, R. H., Leo, R. P., Amalo, H., Kampus, A., Adisucipto, J., & Timur, N. T. (2025). *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (*

- Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1) Universitas Nusa Cendana , Indonesia.*
- Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2012). *EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI JAWA TIMUR* Bella Pristika Badrudin Kurniawan. 241–254.
- Ilmu, T., & Amuntai, A. (2024). *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 17(2), 258–263.
- Intelek, J., Cendikia, I., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2024). *DILEMA PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DAN KEMACETAN : STUDI KASUS PASAR PANNAMPU , MAKASSAR THE DILEMMA OF PUBLIC ROAD USE BY STREET VENDORS AND TRAFFIC CONGESTION : A CASE STUDY OF PANNAMPU MARKET , MAKASSAR*. 6902–6910.
- Internal, D. A. N., Kasus, S., & Parepare, K. (2025). *S i l i t e k*. 05(03), 1335–1348.
- Kaki, P., Jalan, D. I., & Kota, P. (2025). *Jurnal simetrik*. 18–23.
- Kusuma, N. E. (2024). *ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS AS IMPLEMENTATION OF “ SATPOL PP ” DUTIES*. X(4), 82–89.
- Made, N., Karma, S., Hukum, F., Warmadewa, U., Hukum, K., & Mengemudi, S. I. (2021). *KETAATAN PENGGUNA JALAN DALAM TERTIB BERLALU*. 2(3), 553–557.
- Management, D. (2021). *ANALISIS PENGARUH VOLUME KENDARAAN TERHADAP*. 7(1), 40–47.
- Mbei, C. Y., Sanga, K. P., & Dilliana, S. M. (2024). *Analisis Perilaku Petugas Parkir Tepi Jalan di Kabupaten Sikka dalam Perspektif Etika*. 2(4).
- Minggu, A., & Putra, Y. (n.d.). *JURNAL SIARTEK ISSN: 2442 - 8299 ANALISIS PERGERAKAN ARUS LALU LINTAS DIKAWASAN*. 10(2).
- Moat, R. Y., Nobertus, Y., Muda, T., & Pau, D. I. (2023). *ANALISIS KEMACETAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN NASIONAL MAUMERE – LARANTUKA (KELURAHAN GELITING KECAMATAN KEWAPANTE) KABUPATEN SIKKA - MAUMERE*. 9(1), 1–7.
- Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ruratulangi, U. S. (2020). *ANALISIS DAMPAK KEMACETAN TERHADAP EKONOMI*. 20(01), 83–93.

- Pertiwi, M. E. (2024). *DAMPAK RELOKASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT TALANG BANJAR KECAMATAN JAMBI TIMUR)*. 3(1), 112–135.
- Purnama, R., Lubis, A. R., Yulianti, N., & Miftahudin, A. (2023). *The Influence of Structuring and Empowering Street Vendors Through Government Policies Using The " Rasch Model " Approach* (Issue 5). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3>
- Riset, J., Kasus, S., Geliting, D., Kewapante, K., Sikka, K., Lotak, A., Dince, M. N., Maryetha, W., & Jaeng, Y. (2024). *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa Universitas Nusa Nipa , Indonesia*. 2(3).
- Rukmana, M. G., Dalamnegeri, P., & Barat, J. (2020). *Efektivitas peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kota bandung*. 2(1), 35–52.
- Sanaky, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah. *Jurnal Simetrik*, 11(1), 432–439. <https://doi.org/10.31959/js.v11i1.615>
- Sari, S. R., Murti, N. K., & Hilmy, M. F. (2023). *PENGARUH KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KUALITAS KORIDOR JALAN STUDI KASUS: KORIDOR JALAN HAYAM WURUK DAN JALAN KERTANEGARA , KOTA SEMARANG*. 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.26418/lantang.v10i1.54358>
- Selatan, K., Pasar, D., & Lintas, L. (2020). *lain dirasakan semakin besar akibat dari aktivitas parkir di badan jalan*. 5(2), 19–29.
- Sonny, R., & Antou, T. (2025). *Penataan Koridor Jalandengan Pendekatan Elemen Perancangan Kotadi Jalan Ahmad Yani Kota Maumere*. 5(3), 26640–26646.
- Traditional, K., Management, M., District, I. N. K., District, S., Nusa, E., Province, T., Yunita, K., & Roja, S. A. N. (2021). *Strategi pengelolaan pasar tradisional kewapante di kecamatan kewapante kabupaten sikka provinsi nusa tenggara timur*.
- Wu, J. (2023). *Revealing social dimensions of urban mobility with big data : A timely dialogue*. 2022, 437–468.
- Yahya, L., Buana, S., Abdilah, R. A., Rabinah, A. H., Sipil, J. T., Semarang, P. N., Tembalang, S. H., & Semarang, K. (2022). *Pengaruh pedagang kaki lima dan parkir terhadap kinerja jalan di kota semarang*. 08, 80–90.

- Yany, R. M., Farida, I., & Walujodjati, E. (n.d.). *RUAS JALAN (STUDI KASUS : RUAS JALAN CILEDUG KOTA GARUT)*.
- Zainal, J., & Kota, Z. (2021). *ANALISIS KEMACETAN LALU LINTAS PADA PASAR TUMPAH. 1(2)*.
- Zalvia, E. T., & Adnan, F. (2025). *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang. 1, 1–12*.